

PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, SUKU BUNGA, DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

(Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022)

Widya Annisa; Dra. Mujiyati, M.Si

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan laporan yang diperoleh melalui situs Bank Indonesia dan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini oleh data menggunakan SPSS 22. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linear berganda, uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Sedangkan nilai tukar rupiah dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertamabahan nilai.

Kata Kunci: Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak, Suku Bunga.

Abstract

The aim of this research is to analyze the influence of inflation, the rupiah exchange rate, interest rates and the number of taxable entrepreneurs on value added tax revenues. This research method is quantitative. This research uses secondary data. The data collection method used in this research uses reports obtained obtained via the Bank Indonesia website and the DJP Central Java II Regional Office for 2018-2022. In this research, the data were used SPSS 22. The data analysis techniques used in this research were normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple linear regression analysis, simultaneous test (F test), partial test (t test), and coefficient of determination test (R^2). The results of this research show that inflation and taxable entrepreneurs have an influence on value added tax revenues. Meanwhile, the rupiah exchange rate and interest rates have no effect on value-added tax revenues

Keywords: Inflation, Rupiah Exchange Rate, Value Added Tax Revenue, Taxable Entrepreneurs, Interest Rates.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan banyak penduduk yang tercatat mencapai 278.696,2 ribu jiwa dengan daratan dan perairan yang sangat luas (Badan Pusat Statistik, 2023). Tidak dapat dipungkiri jika Indonesia memiliki banyak industri barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Barang dan jasa tersebut merupakan salah satu potensi penerimaan pajak berupa PPN. Menurut (Mujiyati & Abdul Aris, 2023), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung (Sinaga, 2014). Sedangkan pajak langsung menurut (Putri, 2022), adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dan merupakan pajak yang dipungut secara berkala. Dalam UU no. 42 tahun 2009, tarif PPN adalah 10%. Sementara dalam undang-undang HPP, berlaku peraturan baru untuk tarif PPN yang termuat dalam pasal 7 HPP sebesar 11% akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 (Mujiyati & Abdul Aris, 2023).

Penerimaan PPN tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penerimaan PPN yaitu jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar. Faktor eksternal yang menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dipengaruhi dari ekonomi makro suatu negara seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga (Junianto et al., 2020). Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus (Bawono et al., 2021). Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mengurangi konsumsi barang dan jasa yang dikenai PPN. Sebaliknya, inflasi yang rendah dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan meningkatkan penerimaan PPN.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga berperan penting dalam penentuan penerimaan PPN. Nilai tukar rupiah yaitu nilai uang luar negeri terhadap nilai uang domestik (Junianto et al., 2020). Suku bunga mempengaruhi pajak karena jika suku bunga mengalami kenaikan, orang akan melakukan pengurangan investasi mereka dan memilih melakukan penyimpanan uang di bank (Mawarni et al., 2021). Fluktuasi suku bunga juga berdampak terhadap daya beli konsumsi barang atau jasa yang akan mempengaruhi penerimaan PPN (Warnita et al., 2016). Selain faktor-faktor ekonomi tersebut, jumlah pengusaha kena pajak juga mempengaruhi penerimaan PPN. Semakin banyak pengusaha yang terdaftar dan taat membayar pajak, semakin besar penerimaan PPN yang dapat diperoleh oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemantauan jumlah pengusaha kena pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan PPN.

Menurut studi oleh (Renata et al., 2018), peningkatan jumlah pengusaha kena pajak dapat berkontribusi terhadap penerimaan PPN. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Mujiyati & Abdul Aris, 2023). Namun, agar dapat diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak, seorang pengusaha harus memenuhi beberapa syarat, antara lain minimal omset dalam satu tahun buku dan melalui proses sesuai prosedur yang berlaku. Pengusaha kecil yang dalam satu tahun buku atau kalender mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) mempunyai kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Mujiyati & Abdul Aris, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022).

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik melalui analisis regresi linear berganda. Populasi penelitian ini adalah jumlah seluruh Pengusaha Kena Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dari 18 KPP selama 5 tahun. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan jumlah PKP. Data Penerimaan PPN dan jumlah PKP diperoleh dari sumber yang telah ada, yaitu di Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui website e-Riset 2.0 Direktorat Jenderal Pajak (<https://eriset.pajak.go.id/>). Sedangkan inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga diperoleh website Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/>).

Dalam penelitian ini menggunakan alat bantu berupa aplikasi SPSS 22. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi) dan Uji Hipotesis (Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji t), Koefisien Determinasi (R^2)).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini, cara untuk mendeteksinya adalah dengan menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-smirnov	Keterangan
<i>Unstandarized Residual</i>	0.200 ^{c,d}	Sebaran normal

Sumber: Data Diolah Primer, 2024 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil pengujian Kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada model regresi sebesar 0.200 yang artinya lebih besar dari 0.05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan regresi model penelitian ini mempunyai data sebaran normal.

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Inflasi	0.632	1.582	Tidak terjadi multikolinearitas
Nilai Tukar Rupiah	0.982	1.018	Tidak terjadi multikolinearitas
Suku Bunga	0.391	2.559	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengusaha Kena Pajak	0.449	2.229	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Diolah Primer, 2024 (Lampiran 3)

Hasil dari tabel 2 dapat dilihat bahwa setiap variabel mempunyai nilai VIF masing-masing dibawah 10.00 dan mempunyai nilai tolerance diatas 0.10. Sehingga dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki kesamaan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain atau tidak. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Inflasi	0.721	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Nilai Tukar Rupiah	0.498	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Suku Bunga	0.312	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengusaha Kena Pajak	0.316	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah Primer, 2024 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil tabel 3 dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel bebas yaitu variabel inflasi menunjukkan nilai $0.721 > 0.05$. Kemudian variabel nilai tukar rupiah menunjukkan nilai $0.498 > 0.05$. Variabel suku bunga menunjukkan nilai $0.312 > 0.05$. Dan Variabel pengusaha kena pajak menunjukkan nilai $0.316 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	<i>R Square</i>	Durbin-Watson
1	0.196 ^a	0.022	2.041

Sumber: Data Diolah Primer, 2024 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil uji tabel 4 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rumus:

$$dU < DW < 4-dU$$

$$dU = 1.7274$$

$$DW = 2.041$$

$$1.7274 < 2.041 < 2.2726$$

Diketahui untuk nilai $DW = 2.041$. Selanjutnya dibandingkan dengan nilai tabel sig 5% (0.05) dengan jumlah sampel 60 dan jumlah variabel independen 4 ($K = 4$). Sehingga didapatkan hasil dU dari tabel $DW = 1.7274$. dapat disimpulkan bahwa model regresi linear dalam penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

3.2 Uji Hipotesis

3.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan melihat pengaruh variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu inflasi (X1), nilai tukar rupiah (X2), suku bunga (X3), dan pengusaha kena pajak (X4), terhadap variabel terikat penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	T
(Constant)	-52.068	39.912	-1.305
INF	5.602	2.191	2.556
NTR	5.602E-5	.000	.898
SK	2.209	3.481	.634
PKP	.008	.002	4.064

Sumber: Data Diolah Primer, 2024 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil uji tabel 5 dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 \text{ INF} + \beta_2 X_2 \text{ NTR} + \beta_3 X_3 \text{ SK} + \beta_4 X_4 \text{ PKP} + \square$$

$$Y = -52.068 + 5.602 \text{ INF} + 5.602\text{E-}5 \text{ NTR} + 2.209 \text{ SK} + 0.008 \text{ PKP} + \square$$

Analisis persamaan regresi diatas dapat diinterorientasikan koefisien setiap variabel sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta diperoleh nilai -52.068, dapat diartikan apabila tidak ada variabel X yang mempengaruhi variabel Y Penerimaan PPN sebesar -52.068.
2. Koefisien B1 bernilai positif, yaitu 5.602, menjelaskan bahwa apabila variabel X1 (Inflasi) meningkat sebesar satu satuan, maka Y meningkat sebesar 5.602.
3. Koefisien B2 bernilai positif, yaitu 5.602E-5, menjelaskan bahwa apabila variabel X2 (Nilai Tukar Rupiah) meningkat sebesar satu satuan, maka Y meningkat sebesar 5.602E-5.
4. Koefisien B3 bernilai positif, yaitu 2.209, menjelaskan bahwa apabila variabel X3 (Suku Bunga) meningkat sebesar satu satuan, maka Y meningkat sebesar 2.209.
5. Koefisien B4 bernilai positif, yaitu 0.008, menjelaskan bahwa apabila variabel X4 (Jumlah Pengusaha Kena Pajak) meningkat sebesar satu satuan, maka Y meningkat sebesar 0.008.

3.2.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel inflasi (X1), nilai tukar rupiah (X2), suku bunga (X3), dan pengusaha kena pajak (X4) berpengaruh secara simultan atau Bersama-sama terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Uji F

Nilai F	Signifikansi	Keterangan
12.100	0.000 ^b	Berpengaruh bersama-sama

Sumber: Data Diolah Primer, 2024 (Lampiran 4)

Hasil dari perhitungan pada tabel 6 diperoleh nilai signifikansi variabel inflasi (X1), nilai tukar rupiah (X2), suku bunga (X3), dan pengusaha kena pajak (X4) secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) adalah 0.000 kurang dari 0.05 dan nilai F hitung 12.100 lebih dari F tabel 2.540 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel inflasi (X1), nilai tukar rupiah (X2), suku bunga (X3), dan pengusaha kena pajak (X4) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y).

3.2.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh setiap variabel bebas yaitu inflasi (X1), nilai tukar rupiah (X2), suku bunga (X3), dan pengusaha kena pajak (X4) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Hasil pengujian uji t dapat dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pengujian Uji t

Model	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	-1.305	0.197	
INF	2.556	0.013	Diterima
NTR	0.898	0.373	Ditolak
SK	0.634	0.528	Ditolak
PKP	4.064	0.000	Diterima

Sumber: Data Diolah Primer, 2024 (Lampiran 4)

Berdasarkan dari Tabel 7, maka hasil dari pengujian uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian diperoleh t hitung variabel inflasi (X1) adalah $2.556 >$ nilai t tabel yaitu 2.000 atau nilai sig. $0.013 <$ dari 0.05 maka H1 diterima pada signifikansi 0,05. Artinya variabel inflasi (X1) berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y).

2. Hasil pengujian diperoleh t hitung variabel nilai tukar rupiah (X2) adalah $0.898 < \text{nilai } t \text{ tabel}$ yaitu 2.000 atau nilai sig. $0.373 > \text{dari } 0.05$ maka H_0 diterima pada signifikansi 0.05. Artinya variabel nilai tukar rupiah (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y).
3. Hasil pengujian diperoleh t hitung variabel suku bunga (X3) adalah $0.634 < \text{nilai } t \text{ tabel}$ yaitu 2.000 atau nilai sig. $0.528 > \text{dari } 0.05$ maka H_0 diterima pada signifikansi 0.05. Artinya variabel suku bunga (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y).
4. Hasil pengujian diperoleh t hitung variabel pengusaha kena pajak (X4) adalah $4.064 > \text{nilai } t \text{ tabel}$ yaitu 2.000 atau nilai sig. $0.000 < \text{dari } 0.05$ maka H_1 diterima pada signifikansi 0.05. Artinya variabel pengusaha kena pajak (X4) berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y).

3.2.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas dalam menjelaskan variabel terkait. Hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0.684 ^a	0.468	0.429	15.49411

Sumber: Data Diolah Primer, 2024 (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai R Square sebesar 0.468. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa variabel inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan pengusaha kena pajak mampu menjelaskan variabel penerimaan pajak negara sebesar 46.8% dan 53.2% dipengaruhi oleh faktor di luar model.

3.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga dan pengusaha kena pajak (PKP) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan studi pada kantor wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022.

1) Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung adalah $2.556 > \text{nilai } t \text{ tabel}$ yaitu 2.000 dengan nilai sig. $0.013 < \text{dari } 0,05$.

Pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN dapat dijelaskan melalui mekanisme harga barang dan jasa yang meningkat selama inflasi, yang secara langsung meningkatkan basis pajak. Karena PPN

dikenakan pada nilai barang atau jasa, peningkatan harga akibat inflasi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana inflasi dapat berperan sebagai faktor yang mendukung peningkatan penerimaan PPN, meskipun di sisi lain, inflasi juga dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Rizqi & Ekowati, 2022; Sapridawati et al., 2021; Wulandari & Yulianti, 2023) yang menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai.

2) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung adalah $0.898 <$ dari nilai t tabel yaitu 2.000 dengan nilai sig. $0,373 >$ dari $0,05$.

Fluktuasi nilai tukar rupiah biasanya memengaruhi harga barang impor yang dapat mempengaruhi konsumsi dan pada akhirnya penerimaan PPN. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang terhadap penerimaan PPN. Hal ini mungkin disebabkan oleh kontribusi yang kecil dari impor terhadap penerimaan PPN atau adanya faktor kompensasi dari penjualan domestik yang tetap kuat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Amelia & Kunawangsih, 2023; Arifatunnisa & Witono, 2022; Sinambela & Rahmawati, 2019) yang menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai.

3) Pengaruh Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung adalah $0.634 <$ dari nilai t tabel yaitu 2.000 dengan nilai sig. $0,528 >$ dari $0,05$.

Tidak berpengaruhnya suku bunga terhadap penerimaan PPN mungkin terjadi karena fluktuasi suku bunga tidak secara langsung memengaruhi konsumsi masyarakat secara cepat. Suku bunga yang lebih tinggi mungkin memengaruhi biaya pinjaman atau kredit, yang dapat mengurangi konsumsi dalam jangka panjang, tetapi dampaknya terhadap penerimaan PPN tidak begitu terlihat dalam periode yang lebih pendek. Oleh karena itu, meskipun ada kecenderungan hubungan positif, pengaruh ini tidak memiliki pengaruh dalam analisis statistik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Junianto et al., 2020; Simarmata & Bastari, 2018) yang menunjukkan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai.

4) Pengaruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung adalah $4.064 >$ dari nilai t tabel yaitu 2.000 dengan nilai sig. $0,000 <$ dari 0,05.

Jumlah pengusaha kena pajak (PKP) yang lebih banyak akan memperluas basis pajak, karena setiap transaksi yang dilakukan oleh PKP dikenakan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kepatuhan dan jumlah PKP dalam meningkatkan penerimaan negara melalui PPN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Mawarni et al., 2021; Wulandari & Yulianti, 2023) yang menunjukkan bahwa variabel pengusaha kena pajak memiliki pengaruh terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022, hal ini didukung dengan hasil t hitung $2.556 >$ dari t tabel 2.000 dengan nilai probabilitas 0.013 yang mana nilai tersebut dapat dinyatakan lolos karena $<$ dari 0.05 dan koefisien regresi X_1 sebesar 5.602. Jadi, hipotesis pertama yang mengatakan bahwa inflasi diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dapat dilihat dari uji t yang terbukti berpengaruh, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
- 2) Nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022, hal ini didukung dengan hasil t hitung $0.898 <$ dari t tabel 2.000 dengan nilai probabilitas 0.373 yang mana nilai tersebut tidak lolos karena $>$ dari 0.05 dan koefisien regresi X_2 sebesar $5.602E-5$. Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa nilai tukar rupiah diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dapat dilihat dari uji t terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang tidak terbukti berpengaruh, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.
- 3) Suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022, hal ini didukung dengan hasil t hitung $0.634 <$ dari t tabel 2.000 dengan nilai probabilitas 0.528 yang mana nilai tersebut tidak lolos karena $>$ dari 0.05 dan koefisien regresi X_3 sebesar 2.209. Jadi, hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa nilai tukar rupiah diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak

pertambahan nilai, dapat dilihat dari uji t terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai tidak terbukti berpengaruh, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

- 4) Pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022, hal ini didukung dengan hasil t hitung $4.064 >$ dari t tabel 2.000 dengan nilai probabilitas 0.000 yang mana nilai tersebut lolos karena $<$ dari 0.05 dan koefisien regresi X4 sebesar 0.008. Jadi, hipotesis pertama yang mengatakan bahwa pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai diduga berpengaruh positif, dapat dilihat dari uji t terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai terbukti berpengaruh, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

4.2 Saran

- 1) Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperoleh data per KPP yang dibawah oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel yang belum digunakan dan diteliti dalam mempengaruhi variabel penerimaan pajak pertambahan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N., & Kunawangsih, T. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(2), 1–16.
- Arifatunnisa, A., & Witono, B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar AS Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 174–181. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1012/744>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Bawono, A., Ulinnuha, & Kava Nasikin, M. (2021). The Analysis of Inflation Effect, Interest Rate and Exchange Rate on Financing: Third-Party Funds as an Intervening Variable of Sharia Banking in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 250–274. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p250-274>
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–321. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4439>
- Mawarni, R., Sari, T. K., & Anggiyasari, Y. D. (2021). Analisis Variabel Pengaruh Penerimaan PPN dan PPnBM. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 23–40. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i2.475
- Mujiyati, & Abdul Aris, M. (2023). *Perpajakan Indonesia Menuju Patuh Pajak (dalam Bingkai UU*

HPP) 2023 (Edisi ke-2).

- Putri, S. (2022). *Analisis Mengenai Penggolongan dan Sifat Pajak Yang Berlaku dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*. November.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kanishka, B. (2018). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–9.
- Rizqi, M., & Ekowati, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 2015-2021. *Prosiding SNAM PNJ*, 3.
- Sapridawati, Y., Indrawati, N., Zirman, Z., & Sofyan, A. (2021). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *The Journal of Taxation*, 2(1), 75–93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jot.v2i1.14247>
- Simarmata, M. M., & Bastari. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 7(1), 22–33. <https://doi.org/10.24114/qej.v7i1.17549>
- Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Ekuivalensi*, 5(1), 83–97.
- Warnita, T., Fauziati, P., & Yulistia, R. (2016). Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*, 9(1).
- Wulandari, D. S., & Yulianti, V. (2023). Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, 19(01), 66–84.